**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT DALAM URUSAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2018**

Oleh : Ori Hanifinanda

E-mail : oriihanifinanda@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Unemployment is a situation in which someone belonging to the labor force category does not have a job and is not actively looking for work. In this case, it is the regional government's concern in managing its own household, to reduce the number of unemployed people in West Pasaman Regency, the authority is given to the West Pasaman Regency Manpower Office as the executor of government affairs in the manpower sector.

The purpose of this study is to determine the implementation of authority carried out by the West Pasaman Regency Manpower Office in 2018. The research location is in the West Pasaman Regency Manpower Office. This research uses a qualitative approach. This type of research is descriptive. Data were collected through informants purposively. Data collection techniques using interviews and documents.

The results show that the implementation of authority in manpower affairs by the West Pasaman Regency Manpower Office in 2018 comes from the authority of Attribution. Exercise of authority in two sub-fields, first, in the sub-sector of job training and productivity. Second, in the sub-sector of manpower placement.

Keywords: Attribution, Job Training, Job Placement

PENDAHULUAN

Untuk memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemerintahan daerah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan konkuren, urusan konkuren ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ketenagakerjaan adalah salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Salah satu urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Kabupaten atau Kota adalah urusan Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor pembangunan yang layak mendapat perhatian serius oleh pemerintah, karena dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sektor ini dinilai cukup berpotensi dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Sesuai dengan peran dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan tersebut maka setiap daerah Kabupaten/ Kota memiliki Dinas Tenaga Kerja

sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan di Kabupaten/ kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 209/210 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perangkat Daerah, maka salah satu perangkat daerah kabupaten/ kota adalah dinas. Fungsi dinas adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta melaksanakan Tugas Pembantuan.

Salah satu daerah Kabupaten/ Kota yang terus berupaya melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja adalah Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat adalah kabupaten muda yang terletak di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman tahun 2003. Sampai pada tahun 2018, Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu Kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman Barat maka Pemerintah membentuk Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi hal ini berdasarkan dari Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018. Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, maka Dinas Tenaga Kerja berfungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah dibidang tenaga kerja, serta berperan untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja kepada masyarakat sehingga Dinas Tenaga

kerja memiliki peran yang sangat penting untuk melaksanakan urusan tenaga kerja di Kabupaten Pasaman Barat.

Kewenangan Pemerintahan daerah dalam urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terdapat pada lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan Pusat dan Daerah dan Daerah Kabupaten/ kota. Intisari dari pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang diberikan kepada kabupaten/kota terdapat 3 (tiga) sub bidang yaitu :

1. Sub bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

2. Sub bidang Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja.

3. Sub bidang Hubungan Industrial.

Hubungan industrial mempunyai tugas yang berkaitan dengan hubungan industrial dan transmigrasi.

Dalam skripsi ini penulis akan memfokuskan penelitian pada dua sub bidang tenaga kerja yaitu sub bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga

kerja serta sub bidang penempatan tenaga kerja.

Salah satu masalah ketenagakerjaan yang masih terjadi di Pasaman Barat adalah masalah pengangguran. Beberapa hal yang menjadi permasalahan hingga saat ini terkait urusan Ketenagakerjaan sehingga menyebabkan masalah pengangguran yaitu :

1. Masih kurang maksimalnya penyerapan tenaga kerja.
2. Belum selesainya pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) di Kabupaten Pasaman Barat
3. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (*Job fair*)

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015-2018

No	Tahun	Angkatan Kerja	Pengangguran	TPT %
1	2015	183.878	6.974	3,79%
2	2016	-	-	-
3	2017	194.982	7.783	3,99%
4	2018	192.928	6.506	3,37%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

pada tahun 2018 jumlah pengangguran mengalami penurunan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang "***Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan urusan Ketenagakerjaan tahun 2018***".

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten Pasaman Barat dalam urusan Ketenagakerjaan tahun 2018?

- b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan kewenangan pemerintah Kabupaten Pasaman barat dalam urusan Ketenagakerjaan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten Pasaman Barat dalam urusan Ketenagakerjaan tahun 2018
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten Pasaman Barat dalam urusan Ketenagakerjaan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

KERANGKA TEORI

Kewenangan

Menurut P. Nicolai (1994:4), wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.¹

Menurut Aminuddin Ilmar secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik.²

Sementara itu jika berbicara tentang sumber-sumber kewenangan,

maka terdapat tiga sumber kewenangan, yaitu :

1. Sumber Atribusi

Sumber atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

2. Sumber Delegasi

Sumber delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. Sumber Mandat

Sumber mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.³

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Yang dimaksud dengan moneter dan fiskal adalah kebijakan makroekonomi.

Sebagai daerah otonom, kabupaten/ kota itu memiliki kewenangan pemerintahan yang sedemikian luas, hampir mencakup semua kewenangan di bidang pelayanan di daerah yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/ kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan

¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Pranadamedia Group. 2014. Hal 102.

² Ibid. Hal.107

³ Ibid. Hal. 113.

⁴ Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2015. Hal 162.

eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional.

Berdasarkan Prinsip di atas, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota adalah :

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/ kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/ kota
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Kewenangan daerah kabupaten/ kota dalam bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Dinas kabupaten/ kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten/ kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah kabupaten/ kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.⁵

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/ kota memiliki wewenang untuk melaksanakan tiga sub bidang dalam urusan Ketenagakerjaan, yaitu bidang Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja, serta bidang hubungan industrial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018

Sumber wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diperoleh dari Atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang menjadi dasar pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

a. Sub Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Salah satu kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan urusan ketenagakerjaan adalah di Sub bidang Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Berikut adalah pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat:

• Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja

Pelatihan kerja diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pelatihan Kerja

⁵ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2002.Hal.161.

merupakan jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dunia kerja memiliki persyaratan kerja (keahlian dan keterampilan) bakat, minat yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja keluaran pendidikan umum perlu dilatih agar sesuai dengan persyaratan kerja tersebut dan sekaligus dalam rangka pengembangan diri dan peningkatan kualitas kerja sehingga pekerja mampu bekerja secara produktif.

pelatihan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018 adalah pelatihan perbengkelan, pelatihan bordir, dan mengirim peserta kejuruan pertukangan dan kejuruan pariwisata. Sumber dana dari kegiatan servis sepeda motor dan bordir adalah dari APBD, sedangkan untuk mengirim peserta kegiatan ke BPPLK Medan sumber dananya ditanggung BBPLK Medan.

• **Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan**

Pelatihan kewirausahaan merupakan pelatihan manajemen usaha yang diberikan kepada pemula usaha atau yang berminat untuk usaha mandiri sehingga dapat meningkatkan usaha dan membuka lapangan kerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat

“Waktu untuk pelatihan kewirausahaan ini adalah selama enam hari yang berlokasi di Hotel Guchi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar meningkatnya keterampilan, produktivitas tenaga kerja, dan menciptakan wirausaha baru, kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana kerja Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Pasaman Barat, dan kegiatannya untuk seluruh Kecamatan Pasaman Barat, bukan untuk satu atau dua Kecamatan saja”

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat berupa pelatihan produktivitas dan kewirausahaan bertujuan agar masyarakat mendapat pekerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran di Pasaman Barat.

• **Pembangunan BLK Type B**

Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelatihan dan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018 melaksanakan pembangunan BLK di Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.

Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu upaya dari Dinas Tenaga Kerja agar berkurangnya jumlah pengangguran dan merupakan tempat pelatihan bagi pencari kerja.

Tabel 2
Anggaran Kegiatan Pembangunan BLK

Anggaran	Realisasi	%
2.179.155.000	1.942.858.500	89,16

Sumber : Lakip Dinas Tenaga Kerja

Realisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Balai Latihan Kerja jika dipresentasikan adalah 89,16%. Dibandingkan dengan anggaran kegiatan yang lain pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan Pembangunan BLK memiliki anggaran paling banyak yaitu 2.179.155.000, ini memperlihatkan bahwa pentingnya suatu Balai

Latihan Kerja ada di daerah/ Kabupaten Pasaman Barat.

Pembangunan Balai Latihan Kerja ini walaupun dilakukan pembangunan dari tahun 2018, tetapi sampai saat ini Balai latihan Kerja ini belum bisa beroperasi karena masih dalam tahap pembangunan.

b. Sub Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Salah satu kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2018 adalah di sub bidang Penempatan tenaga kerja dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

• Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja (*Job Fair*)

Pasar bursa kerja adalah kegiatan pameran penyuguh perusahaan yang mencari tenaga kerja atau yang disebut (*Job Fair*). Bursa kerja ini memudahkan bagi pencari kerja untuk menemui beberapa perusahaan sekaligus dalam satu kesempatan, tanpa harus bersusah payah datang ke kantor perusahaan tersebut. Sebaliknya bagi perusahaan juga menguntungkan dan bermanfaat juga karena mendekatkan kepada calon pegawai yang nantinya akan mengisi posisi kerja yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut tanpa harus mencari dengan susah payah.

Pameran Bursa kerja atau *Job Fair* Kabupaten Pasaman Barat diadakan pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 4-5 Desember 2018 merupakan upaya dari Pemerintah daerah dan sekaligus wujud dari kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Pasaman Barat, ini merupakan *Job Fair* Pertama yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.

pelaksanaan pameran bursa kerja/ *Job Fair* ini sudah dilaksanakan dengan efektif mungkin oleh Dinas Tenaga Kerja, namun masih adanya kekurangan yaitu tidak adanya aturan dari Dinas Tenaga Kerja kepada para pencari kerja yang mengikuti bursa kerja/ *Job Fair* untuk melaporkan kepada dinas ketika mereka telah diterima oleh Perusahaan saat mengikuti *Job Fair*.

• Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

Kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri adalah untuk mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang kuat, inklusif, serta menciptakan dan memperluas kesempatan kerja baru, memperluas dan mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan produktif dan berkelanjutan pada skala mikro kecil/menengah, serta membangun dan mengembangkan motivasi dan inovasi masyarakat agar mau mengelola potensi sumber daya lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Armen selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai berikut :

“Kita memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pembagian alat cangkul dan juga tajak, kami berharap dengan adanya bantuan tersebut masyarakat dapat menggunakan dengan baik dan secara maksimal, pemberian bantuan ini karena masyarakat banyak yang bekerja di bidang pertanian“

Bidang Penempatan Tenaga Kerja melakukan bantuan kepada masyarakat, tentunya ini sudah sesuai dengan rencana kerja dari Dinas Tenaga Kerja itu sendiri, dan masyarakat pastinya juga menyambut baik bantuan yang telah dilakukan

oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kurang Maksimalnya Pelaksanaa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat sendiri, berikut ini adalah beberapa faktor internal yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam urusan ketenagakerjaan :

- **Belum ada Balai Latihan Kerja**

Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki Balai Latihan Kerja yang merupakan tempat pelatihan bagi para pencari kerja untuk meningkatkan skill dan kemampuan keterampilannya. Padahal kewenangan untuk membuat dan menjalankan Balai Latihan Kerja berada di tangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan Kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2003, belum bisa membentuk perangkat serta sarana prasarana untuk melaksanakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja.

Hingga tahun 2020 Balai Latihan Kerja belum bisa diselesaikan hingga sehingga pelatihan yang seharusnya dilakukan di Balai Latihan Kerja pelaksanaannya jadi dialihkan ke gedung pemerintah daerah lainnya.

- **Kurangnya Komitmen Pemerintah**

Komitmen Pemerintah merupakan kunci dari berhasilnya program yang sudah direncanakan sesuai dengan rencana Kerja yang sudah ada.

Kurangnya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat juga menjadi salah satu penyebab tidak

maksimalnya pelaksanaan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dalam urusan Ketenagakerjaan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Pemerintah, yang mana berarti berasal dari para Pencari Kerja.

- Tidak sesuainya keahlian pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.

Faktor eksternal yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kewenangan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam urusan ketenagakerjaan adalah tidak sesuainya keahlian pencari dengan lapangan kerja yang tersedia, ditambah lagi dalam dunia kerja biasanya perusahaan yang akan merekrut pegawai meminta tenaga kerja yang sudah berpengalaman di bidangnya, sementara kebanyakan dari pencari kerja belum mempunyai pengalaman kerja.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab diatas tentang “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam urusan ketenagakerjaan Tahun 2018” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, Pemberian kewenangannya berasal dari Kewenangan Atribusi. Melalui bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja. Beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

Dinas Tenaga Kerja adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berupa pelatihan perbengkelan, pelatihan bordir, mengirim peserta pelatihan pertukangan dan pariwisata ke BBPLK Medan, melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan, membangun Balai Latihan Kerja, melaksanakan pameran bursa kerja/ job fair, tetapi dalam pelaksanaan *job fair* ini belum adanya laporan berapa banyak tenaga kerja yang diterima, pengembangan tenaga kerja mandiri yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat berupa alat berkebun yaitu cangkul dan tajak.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya kewenangan pemerintah kabupaten Pasaman Barat dalam urusan Ketenagakerjaan tahun 2018 adalah karena dua faktor, yang pertama adalah faktor internal berupa belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja, dan kurangnya komitmen pemerintah, berikutnya adalah faktor eksternal yaitu karena keahlian pencari kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, sehingga lowongan pekerjaan yang ada tidak bisa di isi oleh para pencari kerja.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diatas maka penulis ingin memberikan saran bahwa :

1. Dinas Tenaga Kerja harus memiliki komitmen yang kuat agar segera merampungkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), sehingga setiap pelatihan yang akan dilaksanakan bisa dilakukan di Balai Latihan Kerja milik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sendiri, sehingga dengan adanya Balai Latihan Kerja tersebut akan memungkinkan untuk menampung para Pencari kerja untuk mengikuti pelatihan Keterampilan serta menambah skill masyarakat, dengan bertambahnya skill dari masyarakat maka akan mengurangi jumlah pengangguran dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk pelaksanaan *Job Fair* berikutnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat harus mewajibkan pada peserta untuk melaporkan diri ke Dinas Tenaga Kerja bagi yang mendapat pekerjaan pada Acara tersebut, sehingga akan diketahui berapa banyak penyerapan tenaga kerja dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku :

- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pranada Media Grup

Bungin, Burhan. 2015. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Pranadamedia Group.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Sudrajat Tedi, 2007. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wijayanti, Asri. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan- peraturan :

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja.

Jurnal dan Skripsi :

Margaretha R. 2014. *Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013*, Jom FISIP Volume 1 No. 2- Oktober 2014.

Yuni E. 2016. *Manajemen Dinas Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru Tahun 2014*. Skripsi. Tidak Diterbitkan.

Dokumen Lainnya

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018

Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018